



**DARI SEKOLAH KESEJAHTERAAN KELUARGA ATAS (SKKA) KE
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) KARTINI REMBANG, 1970-2014:
DINAMIKA SEBUAH LEMBAGA PENDIDIKAN DI KABUPATEN
REMBANG**

Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata-1 dalam Ilmu Sejarah**

Disusun oleh:

Tri Sulistiyana

NIM 13030111140049

FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya, Tri Sulistiyana, menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi ini adalah asli hasil karya saya sendiri dan karya ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan baik Strata Satu (S1), Strata Dua (S2), maupun Strata Tiga (S3) pada Universitas Diponegoro maupun perguruan tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam karya ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan maupun tidak telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari karya ilmiah/skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya pribadi sebagai penulis.

Semarang, 17 Januari 2018
Penulis,

Tri Sulistiyana
NIM 13030111140049

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

Pergilah. Laksanakanlah cita-citamu. Kejarlah untuk hari depan. Kejarlah untuk kebahagiaan beribu-ribu orang yang tertindas dibawah hukum yang tidak adil dan paham-paham yang palsu tentang mana yang baik dan mana yang buruk. Pergi. Pergilah. Berjuanglah dan menderitalah, tetapi bekerjalah untuk kepentingan yang abadi.

(Surat Kartini kepada Ny. Von Kol, 21 Juli 1902)

Kami di sini memohon diusahakan pengajaran dan pendidikan anak perempuan, bukan sekali-kali karena kami menginginkan anak-anak perempuan itu menjadi saingan laki-laki dalam perjuangan hidupnya. Tapi karena kami yakin akan pengaruhnya yang besar bagi kaum perempuan, agar perempuan lebih cakap melakukan kewajibannya, kewajiban yang diserahkan alam sendiri ke dalam tangannya: menjadi ibu, pendidik manusia yang pertama-tama.
1

(Surat Kartini kepada Prof. Anton dan Nyonya, 4 Oktober 1902)

Dipersembahkan untuk:

Kedua Orang tua, kakak, teman-teman,

Alumni Guru SKKP atau SKKA dan SMA Kartini Rembang

¹Efatino Febriana, *Kartini Mati Dibunuh Membokar Hubungan Kartini dengan Freemason* (Yogyakarta: Navila Idea, 2010), hlm. 108-109.

Disetujui,

Dosen Pembimbing,

Rabith Jihan Amaruli, S.S., M. Hum.
NIP 198307192009121004

Skripsi dengan Judul “Dari Sekolah Kesejahteraan Keluarga Atas (SKKA) ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Kartini Rembang, 1970-2014: Dinamika sebuah Lembaga Pendidikan di Kabupaten Rembang”, yang disusun oleh Tri Sulistiyana (13030111140049) telah diterima dan disahkan oleh panitia ujian skripsi Program Strata-1 Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro pada hari Rabu, 17 Januari 2018.

Ketua,

Anggota I,

Dr. Dhanang Respati P., M. Hum.
NIP 196808291994031001

Rabith Jihan Amaruli, S. S, M. Hum.
NIP 198307 192009 2 004

Anggota II,

Anggota III,

Prof. Dr. Singgih Tri S., M. Hum.
NIP 196406261989031003

Dr. Haryono Rinaldi, M. Hum.
NIP 196703111993031004

Mengesahkan,

Dekan,

Dr. Redyanto Noor, M. Hum
NIP 195903071986031002

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dari Sekolah Kesejahteraan Keluarga Atas (SKKA) ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Kartini Rembang, 1970-2014: Dinamika Sebuah Lembaga Pendidikan di Kabupaten Rembang”.

Skripsi ini disusun berdasarkan hasil studi dan penelitian dalam bidang ilmu sejarah. Selama proses penulisan skripsi ini terdapat berbagai hambatan, tetapi berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak skripsi ini dapat terselesaikan. Melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan berbagai pihak, baik berupa bimbingan, bantuan materi maupun spiritual kepada beberapa pihak sebagai berikut.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Rabith Jihan Amaruli, S.S, M. Hum., selaku dosen pembimbing yang telah sabar dalam memberikan arahan, dukungan tiada henti, ketelitian dan kesediaan setiap waktu untuk membimbing dan membantu penulis melewati tahapan demi tahapan penyelesaian skripsi ini.

Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, Dr. Redyanto Noor, M. Hum dan Ketua Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, Dr. Dhanang Respati P., M. Hum., yang telah memberikan izin dan rekomendasi penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada para dosen penguji, diantaranya Prof. Dr. Singgih Tri Sulistiyono, M. Hum. dan Dr. Haryono Rinardi, M. Hum., yang telah memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.

Terima kasih juga kepada Prof. Dr. Sutejo K. Widodo, M. Si., selaku dosen wali yang memberikan arahan selama penulis menjadi mahasiswa. Terima kasih juga penulis tujukan kepada seluruh staf pengajar Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya yang telah memberikan banyak ilmu selama studi untuk menambah ilmu bagi penulis, yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Penulis juga

mengucapkan terima kasih kepada seluruh staf TU, perpustakaan Departemen Sejarah, dan perpustakaan Undip yang telah membantu kelancaran akademik serta kelancaran studi pustaka.

Demikian pula penulis tidak melupakan untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (KesBangPol), Badan Pusat Statistik, Kantor Dinas Pendidikan, kepala, anggota, dan karyawan SMA Kartini yang telah banyak membantu dalam melengkapi data untuk mempermudah peneliti menulis sebuah karya ilmiah. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada pegawai kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang atas nama Wahyuni Hadi Saputro, yang telah membantu peneliti mengarahkan pelaku yang terlibat di dalam SKKP, sehingga peneliti dapat mewawancarai para narasumber yang terlibat dalam pembahasan yang direncanakan oleh peneliti.

Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua yang telah mendoakan penulis agar mendapatkan kemudahan dalam proses penulisan dan bimbingan skripsi hingga selesai. Terima kasih kepada Mbak Eka yang selalu memberikan bantuan, baik material maupun spiritual untuk memperlancar penelitian. Selanjutnya penulis mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya kepada Mbak Ria yang selalu membantu saya pada saat mengalami kesulitan dan meluangkan waktunya untuk membantu proses penelitian semaksimal mungkin. Saya tidak melupakan atas doa yang sudah diberikan oleh seluruh keluarga saya untuk menyemangati dengan tiada hentinya.

Terima kasih pula penulis ucapkan kepada teman-teman seperjuangan, Rini, Lusma, Ani, Dewi, Erika, Nonik, Putri, Novy, Dila, Cahaya, Mela, Nailul, Sofi'i, Robbani, Rohadi, Rasidi, Hariyadi, Seno, Arif, Dhani, Galih, Faiz, Iqbal, dan Abi yang telah menjadi teman diskusi selama ini. Khusus untuk kakak kelas: Risda, Cucu, Debora, dan Ristia. Penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung saya, terutama Mbak Serly, Mbak Ndaru, Mbak Yani yang telah memberikan saya semangat untuk pantang menyerah dalam menghadapi suatu persoalan dalam membuat skripsi ini.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada guru-guru SKP/SKKP dan SKKA yang telah memberikan kepada penulis arahan dalam melengkapi sumberpenelitian dan kepada informan yang tidak dapat disebut satu persatu. Penulistidak akan pernah lupa atas pertolongan Keni Muljati dan Kristina Suka Tiwi yang telah membantu saya, dan penulis pun tidak akan lupa untuk berkunjung ke rumah ibu di lain waktu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanyalah milik Allah SWT. Tidak ada hal lain yang penulis harapkan selain kritik dan saran dari pembaca untuk perbaikan penulisan skripsi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kepentingan ilmu pengetahuan.

Semarang, 17 Januari 2017

Tri Sulistiyana

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN <i>MOTTO</i> DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR SINGKATAN	xi
DAFTAR ISTILAH	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
RINGKASAN	xvii
<i>SUMMARY</i>	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang dan Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup	5
C. Tujuan Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Kerangka Pemikiran	11
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika dan Penulisan	23
BAB II REMBANG DAN KEHIDUPAN MASYARAKATNYA, 1960-2014	
A. Kondisi Geografis dan Demografis	24
B. Kondisi Sosial Ekonomi	31
C. Kondisi Sosial Budaya	38
BAB III SEKOLAH KESEJAHTERAAN KELUARGA ATAS (SKKA), 1957-1980	
A. Kebijakan Pendidikan dan Pendirian SKKA	65
B. Para Perintis dan Pengembang SKKA Rembang	71
C. Kurikulum dan Pengembangan Sarana Prasarana	75
D. Penurunan Animo dan Perubahan Status	91

BAB IV	SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) KARTINI REMBANG, 1980-2014	
	A. Pendiri dan Pengelola SMA Kartini	95
	B. Drs. H. R. Soenarno 1985-2011: Sosok Ketua Yayasan SMA Kartini yang Mumpuni	98
	C. Para Kepala Sekolah SMA Kartini, 1981-2014: Profil dan Kontribusi	101
	1. R. Samino Projosoenarjo, B.A.(1981-1983): Sosok Sang Pendiri	101
	2. Soerjono Djati, B.A.(1983-1986): Sosok Pemimpin yang Inovatif	104
	3. Sukemi Sisworahardjo, B.A.(1987-1992): Seorang Pemimpin dan Pendisain	107
	4. Musyarofah, S, Pd., (1992-1997): Pengebang SMA Kartini	110
	5. Drs. Moh. Effendi, (1997-1999): Pembimbing Guru yang Demokratis	113
	6. Sri Mardiyani, S. Pd., (1999-2007): Ide Mengelola Sarana Prasarana Sekolah	117
	7. Endang Sri Wahyuningsih, S.Pd., (2007-2011): Sosok yang Tegas dan Disiplin	119
	8. Sri Purwana, S.Pd., (2011-2014): Membentuk SMA Plus Kartini Rembang yang Menjunjung Program Keterampilan sebagai Wirausahawan	125
	D. Penurunan Animo dan Upaya Bertahan yang dilakukan	130
BAB V	SIMPULAN	139
	DAFTAR PUSTAKA	141
	DAFTAR INFORMAN	148

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
APK	: Angka Partisipasi Kasar
APM	: Angka Partisipasi Murni
APS	: Angka Partisipasi Sekolah
Bappeda	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BPAKD	: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
BPMPKB	: Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana
CBSA	: Cara Belajar Siswa Aktif
IPA	: Ilmu Pengetahuan Alam
IPS	: Ilmu Pengetahuan Sosial
KBK	: Kurikulum Berbasis Kompetensi
Kesra	: Kesejahteraan Rakyat
KGA	: Kursus Guru Atas
KGB	: Kursus Guru Bantu
KLK	: Kursus dan Latihan Kerja
KP	: Kursus Pengantar
KPA	: Kursus Pendidikan Administrasi
KPAA	: Kursus Pendidikan Administrasi Tingkat Atas
KPG	: Kursus Pendidikan Guru
KPKPKB	: Kursus Pengantar ke Pelaksanaan Kewajiban Belajar
KTSP	: Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
MA	: Madrasah Aliyah
MBS	: Manajemen Berbasis Sekolah
ME	: Monitoring dan Evaluasi
Mendikbud	: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
PGRI	: Pendidikan Guru Republik Indonesia

PKI	: Partai Komunis Indonesia
PKK	: Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
PMP	: Pendidikan Moral Pancasila
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
SD	: Sekolah Dasar
SGA	: Sekolah Guru Atas
SGB	: Sekolah Guru Bantu
SGKP	: Sekolah Guru Kepandaian Putri
SKKA	: Sekolah Kesejahteraan Keluarga Atas
SKKP	: Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKP	: Sekolah Kepandaian Putri
SLTA	: Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
SLTP	: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
SMEA	: Sekolah Menengah Ekonomi Atas
SMEP	: Sekolah Menengah Ekonomi Pertama
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SPG	: Sekolah Pendidikan Guru
SPMA	: Sekolah Pertanian Menengah Atas
SMPP	: Sekolah Menengah Pembangunan Pertama
SMTA	: Sekolah Menengah Tingkat Atas
SMU	: Sekolah Menengah Umum
STM	: Sekolah Teknik Menengah
ST	: Sekolah Teknik
THHK	: Tiong Hwa Hwee Kwan

DAFTAR ISTILAH*

- Stakeholder* : Pihak-pihak yang memiliki kepentingan secara langsung dengan sekolah, pengelolaan sekolah, orang tua peserta didik, staf dan karyawan sekolah, komite sekolah, dan komunitas-komunitas pemerhatian pendidikan.
- pendopo* : Bangunan tunggal yang terletak di bagian terdepan rumah berarsitektur Jawa sebagai tempat menerima tamu; umumnya terpisah dari rumah induk. (bangunan yang luas terbuka (tanpa batas atau sekat), terletak di bagian depan rumah, disediakan untuk pertemuan, rapat, peralatan, serta keperluan lain yang ada hubungannya dengan keperluan masyarakat.
- Syawalan/kupatan* : Diselenggarakan 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri, berlokasi di TRP. Kartini Rembang dengan kegiatan lomba (wisata laut), wisata belanja, pertunjukan-pertunjukan musik, dan lain-lain.
- haminte* : Kota praja, kota besar; pemerintahan kota praja pada masa penduduk Belanda.
- sedekah bumi* : Diperingati tiap tahun masyarakat desa setempat karena merasa bersyukur atas semua rahmat dan berkah Allah swt, dengan mengadakan selamatan masakan dan jajanan khas masing-masing desa,

*Daftar istilah ini disusun berdasarkan pada pendapat para ahli dalam kamus, referensi, dan pendapat pribadi.

- serta menampilkan berbagai macam hiburan dan kesenian rakyat baik modern maupun tradisional.
- hard skill* : Keterampilan keras.
- sedekah laut* : Diperingati setiap tahun sekali pada bulan Syawal oleh masyarakatdesa pesisir pantai, karena merasa bersyukur atas rahmat dan berkah Allah swt, dengan mengadakan selamatan masakan dan jajanan khas masing-masing desa yang sebagian dilarung ke laut, serta menampilkan berbagai macam hiburan dan kesenian rakyat baik yang moderen maupun yang tradisional, juga berbagai macam lombapun diselenggarakan, dengan hadiah yang sangat menarik.
- Home Economic* : Pendidikan kesejahteraan keluarga adalah pendidikan yang mengantarkan seseorang kearah keselamatan ketentraman dalam tata kehidupan dan penghidupan keluarga.
- rayon* : Bagian daerah atau wilayah yang dibentuk berdasarkan perjanjian.
- Utiliteit Onderwijs* : Pendidikan Utilitas
- Holland Inlandse School* : Sekolah Belanda.

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1. Peta Wilayah Kabupaten Rembang	25
2.2. Arak-arakan Sedekah Laut di Desa Tasekagung	41
3.1. Denah Alokasi SKKP dan SKKA Rembang Tahun 1970	87
4.1. Desain Logo SMA Kartini Rembang	109
4.2. Hasil Karya Ketrampilan Siswa SMA Kartini Rembang Tahun 2013	128
4.3. Kegiatan Ektrakurikuler Menjahit di KLIK Tahun 2013	129
4.4. Panitia PPDB SMA Kartini Rembang, Menunggu Calon Pendaftaran 2014	137

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1. Perkembangan Penduduk di Kabupaten Rembang Tahun 1965-1990	28
2.2. Menurut Tingkat Penyebaran Mata Pencaharian di Kabupaten Rembang pada 1986	29
2.3. Banyaknya Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Rembang Tahun 2011-2012	57
2.4. Angka Partisipasi Sekolah menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Rembang 2012-2013	60
2.5. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Rembang Tahun 2013-2014	61
3.1. Kurikulum Mata Pelajaran SKP Negeri Rembang dengan Lama Belajarnya Dua Tahun	79
3.2. Jumlah Siswa SKKA Pertahun	93
4.1. Daftar Jumlah Animo Siswa di SMA Kartini Rembang 1981-2014	131

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran:	Halaman
A. Surat Tanda Tamat Belajar (Ijazah) SKP Tahun 1963	156
B. Surat Tanda Tamat Belajar (Ijazah) SKKP Tahun 1973	158
C. Surat Tanda Tamat Belajar (Ijazah) SKKA Tahun 1973	160
D. Surat Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta Tahun 1982	162
E. Surat Keterangan Yayasan Kartini Rembang Tahun 1989	163
F. Piagam Jenjang Akreditasi SMA Swasta Tahun 1985	164
G. Daftar Mata Pelajaran SKKP Negeri Rembang Tahun 1963	165
H. Daftar Guru Bantu SMA Kartini Rembang Tahun 1981-1986	167
I. Lambang SMA Kartini Rembang Tahun 1988	169
J. Daftar Guru Tetap di SMA Kartini Rembang Tahun 1981-1982	170
K. Daftar Murid SMA Kartini Rembang Tahun 1981-1982	172
L. Daftar Mata Pelajaran di SMA Kartini Rembang Tahun 1981-2014	175
M. Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Sekolah Tahun 1987	178
N. Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Sekolah Tahun 1992	179
O. Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Sekolah Tahun 1997	180
P. Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Sekolah Tahun 1999	181
Q. Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Sekolah Tahun 2007	182
R. Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Sekolah Tahun 2011	183
S. Surat Akreditasi SMA Kartini Rembang Tahun 2009	184
T. Surat Akreditasi SMA Kartini Rembang Tahun 2014	186
U. Daftar Alumni SMA Kartini Rembang 1987-2004	188
V. Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan	190
W. Banyaknya Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Pendidikan di Kabupaten Rembang, Tahun Pelajaran 2011-2012	191

RINGKASAN

Penelitian ini berjudul “Dari Sekolah Kesejahteraan Keluarga Atas (SKKA) ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Kartini Rembang 1970-2014: Dinamika sebuah Lembaga Pendidikan di Kabupaten Rembang”. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan sejarah pendidikan, kajiannya berpusat pada sejarah dari ide-ide dan pemikiran-pemikiran besar dalam pendidikan, atau sejarah dari sistem pendidikan dan lembaga-lembaga, atau sejarah perundang-undangan dan kebijakan umum dalam bidang pendidikan. Kemudian, ditunjukkan kepada masalah-masalah yang timbul dalam pendidikan yang dampak-dampaknya (positif ataupun negatif) dirasakan terutama oleh masyarakat sebagai pemakai.

Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa Pendirian Sekolah Kesejahteraan Keluarga Atas (SKKA) di Rembang dimulai dari pendirian SKP yang berdiri pada 1957-an. Kemudian sekolah ini berganti nama menjadi Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama (SKKP), karena SKP sudah tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat. Saat itu, SKP Rembang dipimpin oleh Sri Amiryati sampai mengalami perubahan nama sekolah menjadi SKKP. Setelah berubah nama, sekolah tersebut dipimpin oleh Soemari HP pada 1963. Kurikulum yang diajarkan pun berhubungan dengan aktivitas rumah tangga, seperti menjahit, memasak, mengatur ruang, mencuci, menyetrika, dan membatik. Pendirian SKKA disebabkan oleh kebutuhan pendidikan lanjutan bagi lulusan SKKP. Pada awal 1970, rintisan SKKA Rembang mulai digagas dengan pembentukan panitia khusus di bawah koordinasi pemerintah daerah. Tujuan utama pembentukan panitia ini adalah untuk memberikan pendidikan kejuruan bagi masyarakat Rembang dan sekitarnya sebagai sekolah menuju ke jenjang rumah tangga atau sebagai calon ibu rumah tangga.

Pendirian SMA Kartini Rembang diprakarsai oleh Bupati Rembang saat itu, Soeratman. Inisiatif ini muncul sebagai upaya untuk menyelamatkan SKKA yang telah mengalami kemunduran. Bupati Rembang sebagai manifestasi pemerintah daerah melakukan upaya-upaya strategis guna menyelamatkan SKKA, sebagai perwujudan kebijakan pemerintah nasional tentang integrasi SKKA menjadi SMA. Nama Kartini, dipilih oleh Soeratman untuk mengingat perjuangan pahlawan emansipasi wanita, R.A. Kartini. Pendirian SMA Kartini Rembang, dikelola oleh suatu badan pemerintah daerah melalui suatu yayasan dengan nama Yayasan Pemda.

Sejak berdiri pada 1980-1981, siswa SMA Kartini semua siswanya yang masuk adalah siswa putri. Kepala Sekolah yang ditunjuk waktu itu adalah Kepala Sekolah SMA N 1 Rembang, yaitu Samino Projosoenarjo, dibantu oleh para guru pendidik sekolah lainnya. Pada tahun 2008 SMA Kartini mengalami penurunan animo hingga sekolah tersebut melakukan berbagai cara agar sekolah tetap bertahan di kalangan masyarakat.

SUMMARY

The research is entitled "From School of Welfare of the Upper Family (SKKA) to High School Kartini Rembang 1970-2014: Dynamics of an Educational Institution in Rembang Regency". The study was conducted using historical method. The approach used in this thesis is the historical approach to education, its study centered on the history of ideas and major thoughts in education, or the history of the educational system and institutions, or the history of legislation and general policy in the field of education. , addressed to issues arising in education whose effects (positive or negative) are felt primarily by the community as users.

From the research, it is known that Establishment of School of Family Welfare (SKKA) in Rembang starts from the establishment of SKP which was established in 1957s. Then the school was renamed the First Family Welfare School (SKKP), because SKP is not in accordance with the demands of society. At that time, SKP Rembang headed by Sri Amiryati to change the name of the school to SKKP. After the change of name, the school was led by Soemari HP in 1963. The taught curriculum was also related to household activities, such as sewing, cooking, arranging space, washing, ironing, and batik. SKKA founders were caused by the need for further education for SKKP graduates. early 1970, the RKL SKKA start begins with the establishment of a special committee under the coordination of local government. The main purpose of the establishment of this committee is to provide vocational education for the people of Rembang and surrounding areas as a school to the level of household or as a potential housewife.

The establishment of SMA Kartini Rembang was initiated by Rembang Regent at that time, Soeratman. This initiative emerged as an effort to rescue declining SKKA. Rembang Regent as a manifestation of local government make strategic efforts to save SKKA, as the embodiment of national government policy about the integration of SKKA into high school. Kartini's name, chosen by Soeratman to remember the struggle of the hero of women's emancipation, R.A. Kartini. Establishment of SMA Kartini Rembang, managed by a local government agency through a foundation with the name Foundation Yayasan.

Since its establishment in 1980-1981, Kartini high school students are all students who enter are female students. The appointed principal at that time was Principal of SMA N 1 Rembang, Samino Projosoenarjo, assisted by other school educator teachers. In 2008 SMA Kartini experienced a decrease in interest until the school did various ways to keep the school stay in the community.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Permasalahan

Skripsi ini membahas dinamika sebuah lembaga pendidikan di Kabupaten Rembang, yakni Sekolah Kesejahteraan Keluarga Atas (SKKA) yang bertransformasi menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA) Kartini dari 1970 sampai dengan 2014. Kajian mengenai lembaga ini dirasa penting, karena selain minimnya literatur yang membahas mengenai sekolah tersebut, juga terutama jika dihubungkan dengan fungsi lembaga pendidikan sebagai salah satu soko guru pembentuk karakter bangsa.

SKKA Rembang adalah sebuah lembaga pendidikan kejuruan setingkat SMA yang ditujukan khusus untuk siswa putri. Kurikulum yang diajarkan pun berhubungan dengan aktivitas rumah tangga, seperti menjahit, memasak, mengatur ruang, mencuci, menyetrika, dan membatik. Sekolah ini didirikan pada 1970 oleh Hadi Sanyoto, Bupati Rembang saat itu. Sebelumnya, pada 1957, ia juga sempat mendirikan Sekolah Kesejahteraan Putri (SKP), yang berubah menjadi Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama (SKKP) sekitar tahun 1963.¹ Pendirian sekolah ini merupakan salah satu dari program pemerintah untuk menyediakan pendidikan bagi rakyat miskin yang hanya berhenti sampai di tingkat Sekolah Rakyat (SR) atau Sekolah Dasar (SD) di Rembang. Sementara itu, bagi masyarakat yang tergolong sejahtera, dapat menyekolahkan anak-anak mereka ke luar Rembang, seperti Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Sebagai bagian dari program nasional, sejak 1950 pemerintah membangun SKP di beberapa kota kecil di Jawa. Meskipun sebelumnya sekolah setingkat Sekolah

¹Wawancara dengan Keni Mujiati, 19 Oktober 2016. Ia adalah Guru SKP Rembang pada 1962. Lihat pula, "SMA Kartini Rembang" (http://sma-kartini_rbgblog.blogspot.co.id, diakses pada 13 Februari 2016).

Menengah Pertama (SMP) ini, hanya diselenggarakan di beberapa kota yang ditunjuk, seperti Pekalongan, Surakarta, Yogyakarta, dan Pati.²

Sejak berdiri pada 1960-an, secara nasional eksistensi SKKP terus mengalami penurunan. Jika pada 1960 terdapat 63 SKKP yang tersebar di seluruh Indonesia, maka jumlah ini terus mengalami penurunan pada 1962-1965 hingga hanya tersisa 59 buah. Jumlah ini kembali mengalami penurunan pada 1966-1971 hingga hanya tersisa 30 buah. Penurunan jumlah sekolah SKKP terutama disebabkan oleh perubahan pilihan beberapa orang tua bahwa putri mereka dapat mengenyam pendidikan di luar pendidikan yang berhubungan dengan pekerjaan rumah tangga. Kesempatan kerja yang luas dalam berbagai bidang untuk perempuan, juga menjadi faktor lain yang menurunkan permintaan masyarakat untuk memilih SKKP.³

Berbeda dengan jenjang pendidikan menengah pertama, jumlah sekolah pada jenjang pendidikan menengah atas pada umumnya menunjukkan penambahan. Pada 1960 misalnya, terdapat 233 SMA yang berstatus negeri dan swasta, berdiri di Indonesia, yang berkembang menjadi 284 pada 1961-1965. Namun jumlah ini mengalami penurunan secara drastis pada 1966 sampai dengan 1971 menjadi 189 buah. Senada dengan kondisi SMA, SKKA juga memperlihatkan kondisi yang sama. Jumlah SKKA di seluruh Indonesia bertambah dari 5 SKKA pada 1960 menjadi 38 SKKA pada 1961 sampai dengan 1965. Namun demikian, jumlah ini mengalami penurunan pada 1966 sampai dengan 1971 menjadi 34 buah.⁴ Sebagai sekolah lanjutan dari SKKP, SKKA menerapkan lama pendidikan tiga tahun, seperti halnya SMA. Oleh karena persoalan sarana dan prasarana, pendidikan SKKA diselenggarakan dalam satu unit bersama-sama dengan SKKP. Jika jadwal

²Wawancara dengan Keni Muljati, 19 Oktober 2016.

³Suradi, dkk., *Sejarah Pemikiran Pendidikan dan Kebudayaan* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1986), hlm. 342.

⁴Helius Syamsuddin, dkk., *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Kemerdekaan (1945-1966)* (Jakarta: CV. Manggala Bhakti, 1993), hlm. 90-91.

masuk SKKP pagi jam mulai 07.00 sampai dengan 12.00, maka jadual masuk SKKA dimulai dari jam 13.00 sampai dengan 15.00.⁵

Melihat kondisi tersebut, SKKA Rembang yang terus eksis menjadi sebuah fakta historis yang menarik untuk dikaji. Penyelenggaraan pendidikan pada masa Presiden Soekarno sangat dinamis. Dinamika tersebut misalnya adalah dengan dikurangnya format sekolah kejuruan. Kebijakan tersebut dijalankan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan sekaligus menambah sekolah umum dan mengurangi sekolah kejuruan sebagai sekolah terminal dari anak-anak yang orang tuanya tidak mampu. Oleh karena kebijakan itu pula, pada masa berikutnya, SKKP berubah menjadi SMP Negeri 3 dan SKKA berganti menjadi SMA Kartini. Dari hasil perubahan dan terjadinya integrasi di dunia pendidikan, maka guru-guru yang mengajar di SKKP atau SKKA harus beralih menjadi guru SMP atau SMA. Perubahan itu menjadi kesulitan tersendiri bagi para guru tersebut.⁶ Hal itu karena para guru tersebut hanya menguasai pendidikan keterampilan dan bukan ahli dalam mengajar pendidikan umum.⁷

SKKA Rembang berganti nama menjadi SMA Kartini berdasar pada Surat Keputusan Mendikbud RI No. 030/U/1979, tanggal 7 Februari 1979. Jika semula SKKA hanya menerima siswa putri, setelah berganti status menjadi SMA, sekolah ini tetap menerima siswa putri. Meskipun telah berganti nama menjadi SMA lembaga pendidikan ini tetap diselenggarakan di bawah koordinasi pemerintah daerah, dan tetap berstatus swasta. Oleh karena berada di bawah koordinasi pemerintah daerah pula, sistem pendidikan yang digunakan mengikuti kurikulum Dinas Pendidikan. Sementara, gaji para guru dan karyawan diperoleh dari iuran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang dibayarkan oleh setiap siswa pada tiap bulan. Sekolah ini tanpa ada bantuan dari subsidi Pemda, sebab sekolah ini

⁵Edi Winarno, *Profil SMA Kartini Rembang* (Rembang: Yayasan Pendidikan Kartini, 2000), hlm. 3.

⁶Wawancara dengan Sri Supeni, 19 Oktober 2016. Ia adalah alumni siswa SKP Rembang.

⁷Wawancara dengan Kristina Suka Tiwi, 10 Oktober 2016. Ia adalah Guru SKKP Rembang pada 1958.

berstatus swasta. Pihak Pemda pun keuangannya belum tercukupi pada masa-masa itu.⁸

Sejak berubah nama menjadi SMA Kartini, sekolah ini tidak begitu menunjukkan eksistensi di Rembang maupun di lembaga pendidikan tingkat atas yang lain. Kondisi tersebut, ditunjukkan dengan semakin menyusutnya animo siswa di sekolah tersebut. Sekolah ini tanpa ada batasan golongan status masyarakat untuk mendaftar di sekolah ini, pada awal pembukaan menerima siswa sebanyak 54 anak dan menurun menjadi 51 anak pada 1982. Akan tetapi, dengan nama baru, SMA Kartini tetap harus berkompetisi dengan lembaga pendidikan tingkat atas lain di Rembang, seperti SMA Negeri 1, SMA Negeri 2, Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA), SMA Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), dan Sekolah Pendidikan Guru (SPG). Selain itu, SKKA Rembang juga harus berkompetisi dengan lembaga pendidikan menengah atas yang berbasis keagamaan, seperti Madrasah Aliyah Negeri (MAN), SMK/MA Muhammadiyah, Mu'alimin Mu'alimat, Sekolah Katholik SMEA Yos Sudarso, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Santa Maria. Berangsur-angsur, SMA Kartini kembali menemui masalah seperti pendahulunya, yakni rendahnya animo masyarakat.⁹

Berdasar pada latar belakang di atas, permasalahan utama dalam skripsi ini adalah bagaimana dinamika yang terjadi pada SKKA di Rembang, sejak pendirian pada 1970 sampai dengan perubahan sekolah ini menjadi SMA Kartini. Persoalan tersebut akan dipandu melalui beberapa pertanyaan sebagai berikut. *Pertama*, apa latar belakang pendirian sekolah SKKA, serta siapa saja yang terlibat di dalamnya? *Kedua*, bagaimana dinamika yang terjadi pada masa penyelenggaraan SKKA, sampai ia bermetamorfosis menjadi sekolah SMA Kartini? *Ketiga*, mengapa sekolah tersebut dikelola oleh pemerintah daerah? Kemudian, mengapa

⁸Wawancara dengan Siti Rukipah, 23 Januari 2017. Ia adalah Guru SKKP Rembang pada 1970.

⁹Wawancara dengan Harum Susilowati, 16 Februari 2016. Ia adalah Karyawan TU SMA Kartini Rembang pada 1983.

pula jumlah siswa sekolah ini terus mengalami penurunan, meskipun telah berganti “baju” menjadi SMA Kartini?

B. Ruang Lingkup

Pembatasan ruang lingkup dalam penelitian sejarah diperlukan agar penelitian lebih terfokus dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara empiris dan metodologis.¹⁰ Penelitian sejarah mengenal tiga ruang lingkup, yakni, spasial, temporal, dan keilmuan. Penulisan sejarah akan menjadi lebih terarah jika dilengkapi dengan perangkat pembatas, baik temporal maupun spasial, karena sejarawan akan terhindar dari hal-hal yang tidak ada relevansinya dengan permasalahan yang ditulis.¹¹

Pertama, ruang lingkup temporal. Ruang lingkup skripsi ini dimulai dari 1970 sampai dengan 2014. Pemilihan 1970 sebagai awal kajian merujuk pada realitas historis pendirian pendidikan khusus wanita menengah atas, SKKA, sebagai lanjutan dari SKKP yang telah mengalami perubahan nama pada 1963. Sebagai lembaga pendidikan khusus wanita, bentuk pembelajarannya pun memiliki karakter kejuruan, yakni fokus pada pengembangan keterampilan (*hard skill*). Baik SKKP maupun SKKA, masing-masing memiliki lama waktu pendidikan tiga tahun. Jika SKKP adalah sekolah setingkat SMP, maka SKKA adalah sekolah setingkat SMA. Pendidikan khusus putri didasarkan atas perubahan orientasi dari sistem pendidikan *Panca Wardhana* yang menempatkan pendidikan kesejahteraan keluarga ke arah kemajuan kehidupan keluarga dan masyarakat. Pada perkembangannya, meskipun tetap berusaha mempertahankan eksistensinya, jumlah siswa SKKA terus mengalami penyusutan. Kemudian, pada 1981, SKKA berubah menjadi SMA Kartini dengan mengikuti format sekolah umum dengan tetap menerima siswa wanita. Meskipun masih menerima siswa

¹⁰Taufik Abdullah editor, *Sejarah Lokal di Indonesia: Kumpulan Tulisan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985), hlm. 10.

¹¹Taufik Abdullah “Pendahuluan: Sejarah dan Historiografi”, dalam Taufik Abdullah dan Abdurrahman Suryomiharjo, ed., *Ilmu Sejarah dan Historiografi: Arah dan Perspektif*(Jakarta: Gramedia), hlm. xii.

putri tetapi dikelola oleh pihak Pemerintah Daerah dan diperbantukan guru sekolah lain dan tidak mengalami perubahan status sekolah. Perjalanan SMA Kartini tidak dapat dikatakan mulus. Sekolah ini mengalami kendala tidak hanya dalam hal dana dan proses pembangunan sarana prasarana sekolah, tetapi juga dalam kendala dari pihak Pemerintah Daerah yang tidak memperbolehkan pengelolaan sekolah secara mandiri karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Peraturan tersebut mendorong sekolah untuk membentuk yayasan sendiri. SMA Kartini juga mengalami permasalahan seperti pendahulunya, yakni jumlah siswa yang semakin menyusut. Meskipun demikian, sekolah ini tetap berusaha bertahan. Sementara itu, pemilihan 2014 sebagai akhir kajian didasarkan pada pertimbangan bahwa pada tahun tersebut, SMA Kartini mendapatkan akreditasi B.

Kedua, ruang lingkup spasial. Ruang lingkup spasial skripsi ini adalah Rembang. Rembang dipilih dengan pertimbangan bahwa pendidikan SKKA diselenggarakan di pusat Kabupaten Rembang, yakni di Jalan Gatot Subroto Nomor 2 Rembang. Selain itu, Kota Rembang menjadi istimewa dengan sosok R.A. Kartini, nama yang juga digunakan menjadi nama sekolah ini pada masa berikutnya. Kartini mengajar sekolah pendidikan wanita di sekitar lingkungan Kantor Kabupaten Rembang atas izin dari suaminya yang bernama Adipati Ario Singgih Djojo Adhiningrat. Gagasan Kartini itu menjadi fakta historis yang tidak hanya penting bagi bangsa Indonesia, tetapi juga bagi masyarakat Rembang. Melalui Kartini, Rembang dikenal sebagai kota yang memiliki sejarah penting dalam memperjuangkan pendidikan bagi kaum wanita. Itulah yang mendasari keputusan pemerintah daerah untuk mendirikan pendidikan khusus wanita, yaitu melalui SKKP dan SKKA.

Ketiga, ruang lingkup keilmuan. Skripsi ini menggunakan ruang lingkup keilmuan sejarah pendidikan. Sejarah pendidikan termasuk kategori sejarah sosial, utamanya berkaitan dengan lembaga pendidikan sebagai institusi sosial. Bahan kajian di dalamnya adalah esensi dari pendidikan itu sendiri, yaitu pengalihan (transmisi) kebudayaan (ilmu pengetahuan, teknologi, ide-ide dan nilai-nilai spiritual serta estetika) dari generasi yang lebih tua kepada generasi yang lebih muda dalam setiap masyarakat atau bangsa. Sejarah dari pendidikan mempunyai

sejarah yang sama tuanya dengan masyarakat pelakunya sendiri, sejak dari pendidikan informal dalam keluarga batih (keluarga inti), sampai kepada pendidikan formal dan non-formal dalam masyarakat agraris maupun industri.¹²

Sejarah pendidikan masih menggunakan pendekatan lama atau “tradisional” yang umumnya diakronis yang kajiannya berpusat pada sejarah dari ide-ide dan pemikiran-pemikiran besar dalam pendidikan, atau sejarah dari sistem pendidikan dan lembaga-lembaga, atau sejarah perundang-undangan dan kebijakan umum dalam bidang pendidikan. Kemudian, perhatian juga ditujukan kepada masalah-masalah yang timbul dalam pendidikan yang dampak-dampaknya (positif atau pun negatif) dirasakan terutama oleh masyarakat pemakai, misalnya, timbulnya golongan menengah yang menganggur karena jenis pendidikan tidak sesuai dengan pasar kerja; atau kesenjangan dalam pemerataan dan mutu pendidikan; pendidikan lanjutan yang dapat dinikmati oleh anak-anak orang kaya dengan pendidikan terminal dari anak-anak yang orang tuanya tidak mampu; komersialisasi pendidikan dalam bentuk yayasan dan lain sebagainya.¹³

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan dan batasan ruang lingkup di atas, di dalam penelitian ini dikembangkan beberapa tujuan penelitian untuk memperjelas fokus analisis sebagai berikut. *Pertama*, mengungkapkan latar belakang pendirian sekolah SKKA serta siapa saja yang terlibat di dalamnya. *Kedua*, menemukan faktor-faktor apa saja yang terjadi dalam masa penyelenggaraan SKKA, sampai berganti menjadi sekolah SMA Kartini Rembang. *Ketiga*, Mengungkapkan soal keterlibatan pemerintah daerah dalam mendirikan sekolah dan mendiskripsikan sebab yang terjadi dalam penurunan animo siswa dan melalui cara apa saja untuk mempertahannya.

¹²Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2007), hlm. 330-332.

¹³Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, hlm. 332.

D. Tinjauan Pustaka

Beberapa pustaka yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan diteliti perlu ditinjau dalam skripsi ini. Relevansi pustaka tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek kajian, tetapi juga metodologi yang digunakan. Beberapa pustaka tersebut adalah sebagai berikut.

Pustaka *pertama* adalah tesis yang berjudul “Perkembangan Kartini Vereeniging (Yayasan Kartini) dan peranannya dalam memajukan pendidikan perempuan Jawa di Kota Semarang, 1913-1942” yang disusun oleh Giri Harto Wiratomo.¹⁴ Tesis ini membahas mengenai perkembangan Yayasan Kartini mulai dari kelahiran, pertumbuhan, dan perkembangannya. Terbentuknya Yayasan Kartini diawali dengan pendirian Perkumpulan Dana Kartini yang bertujuan untuk mendirikan cabang di Semarang dengan nama Kartini Vereeniging (Yayasan Kartini) pada 1913.

Pada 1913, Yayasan Kartini mendirikan Sekolah Kartini yang dilanjutkan dengan pembukaan Sekolah Van Deventer pada 1915. Yayasan Kartini bertujuan untuk membantu para perempuan Jawa agar mendapatkan kesetaraan haknya di bidang pendidikan. Sebagai sebuah organisasi yang dibentuk oleh kalangan Belanda, para pengurus Yayasan Kartini mayoritas berasal dari orang-orang Belanda dan belum menyiapkan pengurus pribumi untuk melanjutkan pengelolaan Yayasan Kartini seterusnya. Padahal tokoh-tokoh kunci Yayasan Kartini, seperti Van Deventer dan Abendanon, sudah meninggal dunia. Setelah 1942 keberlanjutan Yayasan Kartini terbentur iklim nasionalisasi. Sekolah Kartini dan Sekolah Van Deventer dilanjutkan oleh warga pribumi dengan kedudukan berbeda dengan Yayasan Kartini pada 1913-1942.¹⁵

¹⁴Giri Harto Wiratomo, “Perkembangan Kartini Vereeniging (Yayasan Kartini) dan Peranannya dalam Memajukan Pendidikan Perempuan Jawa di Kota Semarang, 1913-1942” (Tesis pada Program Magister Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro, Semarang, 2015).

¹⁵Wiratomo, “Perkembangan Kartini Vereeniging”, hlm. 125-127.

Pustaka *kedua* adalah skripsi yang berjudul “Sekolah Kepandaian Putri di Salatiga Tahun 1953-1962” karya Irma Dwi Setyowati.¹⁶ Skripsi tersebut menyebutkan bahwa pendirian SKP didasarkan pada Undang-undang No. 4 tahun 1950 Bab VII pasal 10 ayat 1. Pada ayat tersebut dikatakan bahwa semua anak, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah berumur enam tahun berhak dan yang sudah berumur delapan tahun diwajibkan belajar di sekolah, sedikitnya enam tahun lamanya. Oleh karena itu, jika seorang anak perempuan mengakhiri kewajiban belajarnya pada usia 12, 13 dan 14 tahun, seorang anak perempuan masih belum mencapai batas umur untuk bekerja atau menikah, karena dalam UU Perubahan ditetapkan hanya anak usia 15 tahun yang boleh bekerja. Itulah mengapa, sekolah menengah pertama seperti SKP diperlukan. SKP adalah sekolah pendidikan khusus wanita yang mengajarkan segala hal yang berhubungan dengan sifat wanita dan dengan tugasnya dalam keluarga. Oleh karena itu, muatan pendidikan pada sekolah ini berkisar kepada rumah, makanan, dan pakaian. Ketiga hal tersebut menjadi muatan utama penyelenggaraan pendidikan. Melalui muatan pendidikan tersebut, setidaknya, para wanita lulusan SKP memiliki persiapan yang cukup untuk menjalankan peranan mereka dalam keluarga.¹⁷

Pustaka *ketiga* adalah skripsi yang berjudul “Sekolah Menengah Kejuruan: Dari SKKA Negeri Filial 3 Jakarta hingga SMK Negeri 33 Jakarta (1975-2012)” yang disusun oleh Ninda Ayuma.¹⁸ SMK Negeri 33 Jakarta berdiri pada 1975 dengan nama SKKA Negeri Filial 3 Jakarta atas usulan dari Kantor Departemen (Kandep) Pendidikan Jakarta Utara. SMK Negeri 33 Jakarta dalam perkembangannya telah berganti nama sebanyak tiga kali. *Pertama*, pada 1975-1978 bernama SKKA Negeri Filial 3 Jakarta sebagai sekolah khusus wanita.

¹⁶Irma Dwi Setyowati, “Sekolah Kepandaian Putri di Salatiga Tahun 1953-1962” (Skripsi pada Jurusan Pendidikan Sejarah, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2013).

¹⁷Setyowati, “Sekolah Kepandaian Putri di Salatiga”, hlm.27.

¹⁸Ninda Ayuma, “Sekolah Menengah Kejuruan: Dari SKKA Negeri Filial 3 Jakarta Hingga SMK Negeri 33 Jakarta (1975-2012)” (Universitas Andalas, Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya, 2015).

SKKA Negeri Filial 3 Jakarta memiliki guru sebanyak tujuh orang dan murid 75 orang. Murid pertama SKKA Negeri Filial 3 Jakarta merupakan murid dari SKKA Negeri 3 Jakarta. Proses belajar mengajar dilaksanakan pada gedung sekolah SD Pademangan 01 pagi. SKKA Negeri Filial 3 Jakarta belum memiliki jurusan dan mempelajari kurikulum tentang kesejahteraan keluarga.

Kedua, pada 1977-1996 bernama SMKK Negeri 6 Jakarta sebagai sekolah kejuruan industri rumah tangga. SMKK Negeri 6 Jakarta menerima murid laki-laki dan perempuan. SMKK Negeri 6 Jakarta memiliki dua jurusan, yaitu tata boga dan tata busana. Masing-masing jurusan memiliki kelas sebanyak dua kelas. Proses belajar mengajar SMKK Negeri 6 Jakarta dilaksanakan di gedung sekolah sendiri di Jalan Alur Laut Rawabadak Jakarta Utara. SMKK Negeri 6 Jakarta mempelajari kurikulum tentang ekonomi rumah tangga. Murid SMKK Negeri 6 Jakarta melakukan praktik di restoran dan toko pakaian.

Ketiga, pada 1997-2012 bernama SMK Negeri 33 Jakarta sebagai Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pariwisata. Proses belajar mengajar pada SMK Negeri 33 Jakarta dilaksanakan di gedung sekolah Jalan Gading Mas Timur II Pengangsaan Dua Jakarta Utara. SMK Negeri 33 Jakarta memiliki empat jurusan, yaitu tata boga, tata busana, akomodasi perhotelan, dan usaha jasa pariwisata. Masing-masing jurusan memiliki kelas sebanyak 2-3 kelas dan unit produksi. Sebagai sekolah pendidikan pariwisata, kurikulum SMK Negeri 33 Jakarta secara khusus mempelajari tentang pariwisata. SMK Negeri 33 Jakarta melakukan kerja sama dengan universitas, hotel, restoran, tour dan travel didalam dan luar negeri untuk praktik kerja murid.¹⁹

Pustaka *keempat* adalah artikel karya Rosita Nur Anarti yang berjudul “Sekolah Guru Kepandaian Putri Negeri Yogyakarta Tahun 1946-1964”.²⁰ Pustaka ini membahas mengenai latar belakang pembukaan Sekolah Guru Kepandaian Putri (SGKP) Negeri Yogyakarta yang merupakan perpindahan dari

¹⁹Ayuma, “Sekolah Menengah Kejuruan”, hlm. 15.

²⁰Rosita Nur Anarti, “Sekolah Guru Kepandaian Putri Negeri Yogyakarta Tahun 1946-1964”, *Jurnal Student*, UNY, Vol. 2, No. 6, 2016, hlm. 25.

SGKP Jakarta ke Yogyakarta karena kondisi keamanan di ibu kota yang kacau. Sekolah ini berdiri pada 1 Januari 1946 di Lempuyangwangi dengan nama SGKP Negeri Yogyakarta. SGKP Negeri Yogyakarta sempat ditutup sementara pada masa revolusi. Perkembangan SGKP Negeri Yogyakarta pada 1946-1964 meliputi baik sistem pendidikan keguruan maupun kejuruan tingkat menengah atas. Sekolah ini bertujuan untuk menghasilkan guru SKP serta tenaga pembangunan di bidang kerumah tanggaan. Perkembangannya juga meliputi kurikulum dengan masa belajar empat tahun. Mata pelajaran di SGKP dibagi menjadi bagian rumah tangga, menjahit dan kerajinan tangan, serta bagian umum. Sekolah ini berpindah-pindah tempat sampai akhirnya menetap di Lempuyangwangi. Penutupan SGKP Negeri Yogyakarta disebabkan karena pergantian kurikulum dan perubahan kebijakan pendidikan pada 1964. Selain itu, SGKP juga sudah tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat. Sementara, SKP telah tutup secara bertahap mulai tahun 1962 dan 1963. Dampak penutupan SGKP ini adalah dibukanya SKKA Negeri Yogyakarta dan perubahan istilah kepandaian putri menjadi kesejahteraan keluarga. Meskipun demikian, sebagian besar ahli pendidikan berpendapat bahwa penutupan SGKP dan pembukaan SKKA hanya perubahan nama.²¹

E. Kerangka Pemikiran

Langkah yang sangat penting dalam membuat analisis sejarah ialah menyediakan suatu kerangka pemikiran yang mencakup berbagai konsep dan teori yang akan dipakai dalam membuat analisis tersebut.²² Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan sejarah pendidikan. Sejarah pendidikan adalah cerita yang tersusun rapi dari suatu periode ke periode lainnya atau selanjutnya yang berkaitan dengan sebuah usaha penyelenggaraan pendidikan. Aspek yang dikaji adalah usaha dan rekayasa manusia dalam mencerdaskan dirinya dan masyarakat sekitarnya, mengembangkan potensinya, terutama mewariskan kecerdasan dan potensi

²¹Anarti, "Sekolah Guru Kepandaian Putri Negeri Yogyakarta", hlm.12-17.

²²Sartono Kartodirdjo, *Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: PT Gramedia Utama, 1992), hlm. 2.

tersebut kepada generasi selanjutnya, untuk melestarikan dan mendialektikan tradisi-budayanya.²³ Proses dalam dunia pendidikan bagaikan suatu investasi, untuk memperoleh pengetahuan, kerangka referensi, dan kemampuan berfikir serta mengekspresikan diri. Pendidikan menjadi penting melalui hidup, khususnya sebagai kebangkitan pribadi pada posisi yang melibatkan penilaian dan tanggung jawab. Dengan demikian tujuan pendidikan tidak dapat direduksi hanya untuk sekadar memenuhi kebutuhan pasaran kerja. Institusi sekolah yang hanya berorientasi pada pemenuhan lapangan kerja akan meredusir hakikat pendidikan dan kemanusiaan itu sendiri.²⁴ Pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia, dalam perkembangannya banyak menimbulkan institusi. Salah satu institusi pendidikan adalah lembaga sekolah. Bila keberadaan sekolah sebagai lembaga pendidikan tidak dapat dipisahkan dari perkembangan zaman dan masyarakatnya. Keberadaan dan substansi serta arah pendidikan selalu mencerminkan warna budaya di mana lembaga pendidikan tersebut berada. Kuatnya pengaruh budaya cenderung menyebabkan lembaga pendidikan sebagai media konservasi.²⁵

Bangsa Indonesia baru mengalami kemerdekaan, dan sedang menjalani pembangunan ekonomi dan serta pembaharuan pendidikan. Kebijakan-kebijaksanaan yang berlaku dalam menentukan rumusan arah serta tujuan baru dari pendidikan. Pendidikan pada masa Revolusi (1945-1950) sudah tampak sangat sederhana tetapi cukup rumit, mengingat situasi politik yang masih labil, sehingga segala rencana pembaharuan dalam rangka mengubah sistem pendidikan kolonial pun dirasakan sangat sulit penanganannya. Bangsa Indonesia dalam mengatur tata nilai baru tersebut telah dirumuskan sebagai tata nilai Pancasila. Pendidikan mempunyai arti dan peranan yang sangat penting karena pembangunan suatu sistem pendidikan merupakan suatu sadar untuk mewujudkan wahana yang memungkinkan bagi manusia untuk mempertahankan kelangsungan

²³Muhammad Rifa'i, *Sejarah Pendidikan Nasional: Dari Masa Klasik Hingga Modern* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 8.

²⁴Hariyono, *Mempelajari Sejarah Secara Efektif* (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1995), hlm. 8.

²⁵Hariyono, *Mempelajari Sejarah Secara Efektif*, hlm. 148.

hidup dan mengembangkan dirinya secara terus-menerus dari generasi ke generasi. Oleh sebab itu, pembangunan suatu sistem pendidikan harus memperhitungkan masalah-masalah eksistensi manusia dalam hubungannya dengan masa lampau, masa kini dan terutama dalam kaitannya dengan kemungkinan-kemungkinan perkembangan masa depan.²⁶

Sistem pendidikan yang dialami sekarang merupakan hasil perkembangan pendidikan yang tumbuh dalam sejarah pengalaman bangsa kita dari masa lalu. Pendidikan tidak berdiri sendiri, tetapi selalu dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Perkembangan pendidikan setelah kemerdekaan, perlu dipahami sepintas tentang bagaimana perkembangannya menjelang kemerdekaan, mengingat bahwa sistem pendidikan lengkap dan yang pernah tumbuh di Indonesia dari zaman kolonial Belanda justru memberikan dasar yang kokoh bagi perkembangan sistem pendidikan Indonesia.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, perubahan-perubahan tidak hanya terjadi dalam bidang pemerintahan saja, tetapi juga dalam bidang pendidikan. Perubahan yang terjadi dalam bidang pendidikan merupakan perubahan yang bersifat mendasar, yaitu perubahan yang menyangkut penyesuaian kebijakan pendidikan dengan dasar dan cita-cita suatu bangsa yang merdeka dan negara yang merdeka. Dalam penyesuaian tersebut, bidang pendidikan mengalami perubahan, terutama dalam landasan utamanya, tujuan pendidikan, sistem persekolahan, dan kesempatan belajar yang diberikan kepada rakyat Indonesia.

Dalam kurun waktu 1945-1950, meskipun mengalami beberapa kali perubahan undang-undang dasar, dasar falsafah negara tidak mengalami perubahan. Oleh karena itu, Pancasila menjadi landasan utama pendidikan di Indonesia.²⁷ Undang-undang ditindaklanjuti dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 yang menyatakan bahwa provinsi mempunyai wewenang dan menyelenggarakan sekolah dasar. Persoalan yang terjadi di dunia

²⁶Sjamsuddin, dkk., *Sejarah Pendidikan*, hlm. 2.

²⁷Rifa'i, *Sejarah Pendidikan Nasional*, hlm. 122.

pendidikan saat itu adalah jumlah penduduk yang masih buta huruf tidaklah sedikit. Kondisi pembangunan bangsa saat itu untuk bisa menyejahterakan rakyat secara keseluruhan dan bisa tampil sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Tujuan dan usaha pendidikan nasional pemerintahan Orde Lama pada awalnya adalah untuk menghilangkan buta huruf. Untuk mencapai tujuan tersebut diadakan wajib belajar 6 (enam) tahun, pendidikan umum setingkat sekolah dasar, pendidikan dasar digratiskan, pemberian beasiswa bagi yang cerdas tetapi tidak mampu secara ekonomi, dan memberikan subsidi kepada organisasi swasta yang menyelenggarakan pendidikan tersebut.

Pendidikan pada periode 1951-1968/1969 dapat dibedakan dalam dua masa yaitu masa demokrasi liberal tahun 1951 sampai 1959 dan masa demokrasi terpimpin tahun 1960 sampai 1966. Sedangkan sejak tahun 1966 adalah masa Orde Baru di mana rencana pembangunan pendidikan lima tahun (Repelita) yang dimulai pada tahun 1969/1970 dilaksanakan secara teratur dan berkesinambungan. Tujuan Pendidikan yang akan dicapai dalam periode ini didasarkan pada Undang-Undang No. 4, Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah yang semula hanya berlaku di wilayah RI. Dalam UU No. 4 Tahun 1950, Bab II, Pasal 3 ditetapkan bahwa tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Pada tahun 1954 dikeluarkan Undang-Undang No. 12 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah.

Sejak tahun 1959 Indonesia berada di bawah gelora Manipol-Usdek yang seolah-olah menjadi panglima dalam kehidupan politik Indonesia dan dalam bidang kehidupan lain. Bidang pendidikan pun tak luput dari pengaruh tersebut. Keputusan Presiden No. 145 Tahun 1965 merumuskan tujuan nasional pendidikan Indonesia sesuai dengan Manipol-Usdek. Dalam Keputusan Presiden RI, No. 145 Tahun 1965 tentang nama dan rumusan induk sistem pendidikan nasional, tujuan ditetapkan sebagai berikut.

Tujuan Pendidikan Nasional baik yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah maupun oleh pihak swasta, dari pendidikan Prasekolah sampai

Pendidikan Tinggi, supaya melahirkan warga negara Sosialis, yang bertanggung jawab atas terselenggaranya Masyarakat Sosialis Indonesia, adil dan makmur baik spiritual maupun materiil dan yang berjiwa Pancasila, yaitu a) Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa; b) Perikemanusiaan yang adil dan beradab; c) Kebangsaan; d) Kerakyatan; dan e) Keadilan Sosial, seperti dijelaskan dalam Manipol/Usdek.

Undang-undang yang mengatur tentang pendidikan ialah UU No. 4 tahun 1950 jo UU No. 12 tahun 1954 tentang Dasar-dasar Pendidikan di sekolah dan UU No. 22 tahun 1961 tentang Pendidikan Tinggi. Dalam pelaksanaannya kemudian diatur oleh keputusan Presiden No. 34 tahun 1972 tentang Pembinaan Seluruh Pendidikan dan Latihan yang disusul oleh Instruksi Presiden No. 15 tahun 1974 tentang Pedoman Pelaksanaan Kepres No. 34 tahun 1972. Untuk sekolah-sekolah, tujuannya diuraikan dalam Surat Keputusan Menteri P dan K tentang pembakuan Kurikulum, No. 008 c/U/1975 untuk sekolah dasar, No. 008d/U/1975 untuk Sekolah Menengah Tingkat Atas. Untuk Pendidikan Tinggi, dasar dan arah pembinaan serta pengembangannya diuraikan dalam Kebijakan Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi sesuai dengan Keputusan Menteri P dan K No. 0140/U/1975.²⁸

Perwujudan cita-cita nasional tersebut telah diterbitkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan serta kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan guna memperoleh pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang sekurang-kurangnya setara dengan tamatan pendidikan dasar (Pasal 3, 5, dan 6 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Undang-undang tersebut menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan nasional adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah (Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989). Sistem pendidikan nasional diselenggarakan melalui 2 (dua) jalur, yaitu jalur pendidikan

²⁸Moehadi, *Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Tengah*, hlm. 112.

sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam dan oleh keluarga, termasuk pendidikan agama, nilai budaya, nilai susila, dan norma perilaku. Satuan pendidikan menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di sekolah atau di luar sekolah. Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar-mengajar secara berjenjang dan bersinambungan.²⁹

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27, tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah secara umum, ketentuan Pasal 12, Undang-undang Nomor 2, Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada prinsipnya menetapkan bahwa selain jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, dapat diselenggarakan pendidikan prasekolah, yang syarat dan tata cara pendirian, bentuk satuan, lama pendidikan serta penyelenggaraannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.³⁰

Menurut Undang-Undang No. 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan, masyarakat, bangsa, dan negara. Lembaga pendidikan merupakan lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan atau belajar mengajar yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu menuju ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar.³¹

²⁹Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/1993 Tentang Kurikulum Pendidikan Dasar (Landasan, Program dan Pengembangan Kurikulum Dasar 9 Tahun Garis-Garis Besar Pogram Pengajaran (GBPP) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) (Surabaya: Yayasan Taruna Nusantara Indonesia, 1994), hlm. 7.

³⁰*Sistem Pendidikan Nasional (UU RI Nomor 2 Tahun 1989) beserta Peraturan Pelaksanaannya 1990* (Semarang: Media Wiyata, 1992), hlm. 52.

³¹Rifa'i, *Sejarah Pendidikan Nasional*, hlm. 162-163.

Ketika kebudayaan dan peradaban manusia semakin maju disamping terjadinya pertumbuhan penduduk dunia yang begitu cepat, yang kemudian menimbulkan banyak perubahan pada struktur sosial dan ekonomi, maka pola kehidupan masyarakat terasa semakin hari menjadi semakin sulit dan berat. Masyarakat berkembang menjadi semakin kompleks dengan sistim pembagian kerja yang tajam, sehingga orang perlu banyak belajar hal-hal yang baru supaya dapat menyesuaikan diri dengan masyarakatnya yang selalu berubah. Kemampuan orang tua tidak sama dan terbatas, disisi yang lain kebutuhan belajar yang dikehendaki oleh warga masyarakat harus tetap dipenuhi. Sebagai akibatnya muncullah kemudian apa yang disebut pendidikan formal, pendidikan di sekolah yang sebagian tanggung jawab pendidikan yang seharusnya dikerjakan oleh orang tua terhadap anak-anaknya dilimpahkan kepada para “cerdik cendekia” yang tergabung dalam organisasi yang disebut “sekolah”, sehingga sampai dengan saat sekarang ini pun istilah pendidikan masih sering di interpretasikan sama dengan sekolah. Pendidikan formal dengan demikian merupakan sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga persekolahan yang dalam tindak operasionalnya memiliki legalitas dan formalitas serta beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Sekolah sebagai pusat pendidikan formal merupakan perangkat masyarakat yang disertai kewajiban memberikan pendidikan. Perangkat ini ditata dan dikelola secara formal, mengikuti haluan yang pasti dan diberlakukan di masyarakat bersangkutan. Haluan tersebut tercermin di dalam falsafah dan tujuan, penjenjangan, kurikulum, pengadministrasian serta pengelolaannya.³² Pendidikan non-formal adalah setiap kegiatan pendidikan yang diorganisasikan di luar sistem persekolahan, baik yang diselenggarakan secara terpisah maupun secara terpadu untuk kegiatan-kegiatan yang amat penting dalam rangka untuk melayani warga belajar mencapai tujuan belajar. Pendidikan non-formal hampir selalu berurusan dengan usaha bimbingan, pembinaan, dan pengembangan warga masyarakat yang mengalami keterlantaran pendidikan, dari keadaan yang kurang tahu menjadi tahu,

³²Bambang Sarwoko, *Konsep Dasar Pendidikan Luar Sekolah* (Semarang: IKIP Semarang Press, 1989), hlm. 4-5.

dari kurang trampil menjadi trampil, dari kurang melihat ke masa depan menjadi seorang yang memiliki sikap mental pembaharuan dan pembangunan.³³

Dilihat dari sisi institusi, institusi pendidikan adalah organisasi sistem kegiatan manusia dalam arti luas, tetap, universal dan tidak terikat satu dengan yang lain sebagai komponen-komponen yang terdapat secara nyata di dalam suatu unit kebudayaan. Peranan sekolah sebagai institusi jauh lebih luas daripada sekedar tempat belajar. Pendirian dan penyelenggaraan sebuah sekolah, pada dasarnya didukung dan dijiwai oleh suatu kebudayaan tertentu. Sekolah adalah salah satu bentuk ikatan kerja sama sekelompok orang, yang bermaksud mencapai suatu tujuan yang disepakati bersama. Sebuah lembaga pendidikan seperti sekolah tidak boleh diartikan sekedar sebuah gedung saja, tempat anak-anak berkumpul dan mempelajari sejumlah materi pengetahuan. Peranan sebagai lembaga pendidikan dibatasi oleh norma-norma yang terdapat di dalam kebudayaan yang mendukungnya. Peranan sekolah sebagai lembaga pendidikan adalah mengembangkan potensi manusiawi yang dimiliki anak-anak agar mampu menjalankan tugas-tugas kehidupan sebagai manusia, baik secara individual maupun sebagai anggota masyarakat.

Hal itu bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai yang serasi dengan kebudayaan di lingkungan masyarakat yang menyelenggarakan sekolah sebagai lembaga pendidikan. Adapun fungsi sekolah adalah meneruskan, mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan suatu masyarakat, melalui kegiatan ikut membentuk kepribadian anak-anak agar menjadi manusia dewasa yang mampu berdiri sendiri di dalam kebudayaan dan masyarakat sekitarnya. Sekolah tidak sekedar sebagai berfungsi untuk mempertahankan kebudayaan yang ada, tetapi juga mengembangkannya sesuai dengan martabat manusia yang kehidupannya selalu dipenuhi dengan kebutuhan yang semakin meningkat.³⁴

³³Bambang Sarwoko, *Konsep Dasar Pendidikan Luar Sekolah*, hlm. 8-9.

³⁴Hadari Nawawi, *Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas sebagai Lembaga Pendidikan* (Jakarta: PT Gita Karya, 1982), hlm. 25-27.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah metode sejarah, yaitu proses menguji dan menganalisis rekaman dan peninggalan masa lamp.³⁵ Metode sejarah mencakup empat langkah, yaitu heuristik (pengumpulan sumber), pengujian sumber (kritik), sintesis, dan penulisan (historiografi).³⁶

Heuristik merupakan tahap pengumpulan sumber pencarian sumber-sumber untuk memperoleh jejak masa lalu. Sumber yang digunakan adalah sumber tertulis dan lisan dibagi atas dua jenis: Sumber primer dan sekunder. Sumber Primer adalah kesaksian dari pada seorang saksi dengan mata-kepala sendiri atau saksi dengan pancaindera yang lain, atau dengan alat mekanis seperti diktafon, yakni orang atau alat yang hadir pada peristiwa yang diceritakannya. Sumber sekunder merupakan kesaksian daripada siapa pun yang bukan merupakan saksi pandangan-mata, yakni dari seseorang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkan-nya.³⁷ Sumber primer merupakan sumber yang utama karena menyangkut validitas, otentisitas, dan kredibilitas dari informasi di dalamnya; sedangkan sumber sekunder yang akan memperkuat dan melengkapi kekurangan informasi dari sumber primer.

Pada penelitian ini, penggunaan sumber tertulis yang pertama adalah instruksi dan surat-surat persetujuan pendirian SMA Kartini Rembang dan surat notaris hasil pembentukan Yayasan Pendidikan Kartini Kabupaten Rembang. Pencarian sumber dan surat-surat lainnya yang diperlukan sangat sulit dicari. Hal ini karena arsip-arsip yang diperlukan tidak diduplikasi atau disimpan sebagai bentuk dokumen arsip sekolah. Sumber tertulis lain yang diperoleh dan digunakan adalah daftar mata pelajaran di SMA Kartini Rembang Tahun 1981-2014, daftar guru bantu SMA Kartini Rembang tahun 1981-1986, daftar murid SMA Kartini Rembang Tahun 1981-1982, daftar guru tetap SMA Kartini Rembang Tahun

³⁵Louis Gottschalk. *Mengerti Sejarah*, terjemahan Nugroho Notosusanto (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1983), hlm. 32.

³⁶Nugroho Notosusanto, *Hakekat Sejarah dan Metode Sejarah* (Jakarta: Mega Book Store, 1984), hlm. 22-23.

³⁷Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terjemahan Nugroho Notosusanto, hlm.35.

1987-2011, daftar jumlah siswa SMA Kartini Rembang Tahun 1981-2014, daftar mata pelajaran SKKP Negeri Rembang, surat tanda tamat belajar siswa SKP, SKKP dan SKKA Rembang, peraturan-peraturan sekolah di SMA Kartini.

Selain sumber tertulis, penelitian ini juga menggunakan sumber lisan melalui wawancara mendalam. Sumber lisan adalah kesaksian pelaku atau saksi mata peristiwa yang terjadi, bukan opini atau pendapat pribadi seseorang. Hal penting dalam tahap ini adalah relevansi antara tema dan sumber yang dikumpulkan. Semakin banyak informasi yang dapat dikumpulkan semakin mudah pula proses dalam penulisan sejarah.³⁸ Sumber primer lisan yang diperoleh melalui wawancara ini digunakan tidak saja sebagai pelengkap tetapi sekaligus pembanding sumber tertulis.³⁹ Hasil wawancara beberapa tokoh yang representatif diseleksi dan dibanding-bandingkan, sehingga diperoleh data yang objektif. Wawancara dilakukan dengan para informan, seperti Kristina Suka Tiwi sebagai Guru SKP/SKKA bagian Tata Boga sejak tahun 1960; Keni Muljati sebagai Guru SKP/SKKA bagian Tata Boga sejak tahun 1963; Siti Saidah sebagai Guru SKKP bagian Olah raga sejak tahun 1963; Jumiati siswa SKKP bagian kelas B (menjahit) sejak tahun 1973; Sukarti sebagai siswa SKKP dan SKKA bagian kelas A (memasak) sejak tahun 1975 dan 1979; Soenarno sebagai Ketua Yayasan SMA Kartini Rembang pada tahun 1985; Sulastri sebagai guru BK SMA Kartini sejak tahun 1983; Harum Susilowati sebagai Karyawan Tata Usaha sejak tahun 1983; Sugiyarto sebagai Guru Sosiologi SMA Kartini sejak tahun 1988; Sri Purwana sebagai Guru Akuntansi dan Menjahit SMA Kartini sejak tahun 1992. Narasumber wawancara dengan para alumni siswa SMA Kartini di antaranya Endang Purwaningsih alumni siswa tahun 1983, Suhartini alumni siswa tahun 1984, Kartinah alumni siswa tahun 1983, Siti Nur Sa'adah alumni siswa tahun 1983, Sri Murtini alumni siswa tahun 1984, Sri Nur Aeni siswa alumni siswa tahun 1987.

³⁸Abdurahman Suryomihardjo, *Pemahaman Bangsa dan Masalah Historiografi* (Jakarta: Idayu, 1975), hlm. 139.

³⁹Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, hlm. 35.

Selain sumber primer, penelitian ini juga menggunakan sumber sekunder untuk melengkapi informasi yang telah diperoleh. Sumber sekunder diperoleh melalui studi pustaka terhadap buku-buku karya para sarjana dan ahli yang relevan serta artikel-artikel yang dimuat dalam majalah dan surat kabar sezaman atau bentuk penerbit yang lain. Sumber-sumber ini berguna untuk melengkapi sumber-sumber primer dalam rangka memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai peristiwa yang diteliti. Sumber sekunder diperoleh dari perpustakaan Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro Semarang, Perpustakaan Widya Puraya Undip, Perpustakaan Wilayah Provinsi Jawa Tengah di Semarang, Kantor Dinas Badan Pusat Statistik Rembang dan Semarang serta Kantor Dinas Pendidikan Rembang.

Tahap *kedua* adalah kritik sumber. Setelah pengumpulan sumber dipandang cukup, tahap berikutnya dilakukan pengujian sumber (kritik sumber) melalui kritik eksteren dan interen.⁴⁰ Kritik interen dilakukan untuk menguji otentisitas atau keaslian sumber, sedangkan kritik interen dilakukan untuk memastikan bahwa informasi dalam dokumen itu dapat dipercaya. Sumber primer yang diperoleh berupa sumber tertulis (dokumen) disimpan oleh lembaga-lembaga yang bersangkutan, sedangkan sumber primer lisan diperoleh dari para informan yang terlibat langsung dengan pengajaran pendidikan di SKKA dan SMA Kartini. Oleh karena itu, setelah proses membanding-bandingkan informasi antara satu dengan yang lain dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sumber yang diperoleh tersebut otentik dan kredibel.

Tahap *ketiga* adalah interpretasi. Interpretasi adalah kegiatan sintesis terhadap fakta-fakta yang diperoleh dari proses kritik sumber. Penelitian sejarah pendidikan dilakukan secara diakronis dan sinkronis guna memperluas persoalan pendidikan lebih lanjut. Sejarah pendidikan dimaksudkan untuk mengakibatkan kesadaran, kesatuan budaya, profesi guru, kebanggaan lembaga pendidikan tertentu. Sejarah pendidikan erat sekali kaitannya dengan sejarah intelektual dan sejarah sosial. Substansi yang diajarkan dimulai dari tradisi pemikiran besar dalam

⁴⁰Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, hlm. 80-117.

dunia pendidikan, tradisi pendidikan nasional, sistem pendidikan dan komponennya, serta perubahan-perubahan sosial-politik, dan gerakan sosial.⁴¹ Pada tahap ini, penulis membangun hubungan antar-fakta sejarah yang relevan dengan peristiwa pendirian SKKA yang berubah menjadi SMA Kartini, dalam kerangka hubungan kronologis dan kausalitas.

Tahap *keempat* adalah penulisan sejarah atau historiografi. Pada tahap ini fakta-fakta yang telah disintesis dan dipaparkan dalam bentuk tulisan sejarah dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar memudahkan pembaca untuk memahami upaya rekonstruksi penulisan. Sejarah pendidikan masih menggunakan pendekatan lama atau tradisional yang umumnya diakronis yang kajiannya berpusat pada sejarah dari ide-ide dan pemikiran-pemikiran besar dalam pendidikan, atau sejarah dari sistem pendidikan dan lembaga-lembaga, atau sejarah perundang-undang dan kebijakan umum dalam bidang pendidikan. Pemerintah ditujukan kepada masalah-masalah yang timbul dalam pendidikan yang dampak-dampaknya (positif atau pun negatif) dirasakan terutama oleh masyarakat pemakai.⁴² Melalui penulisan sejarah ini, diharapkan sejarah perkembangan SKKA menjadi SMA Kartini Rembang dapat dipahami secara bulat dan utuh.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri atas lima bab. Pembahasan setiap bab menitik beratkan pada penjelasan masalah tertentu tetapi hubungan antara subbab dengan bab yang lain saling terkait dan sangat erat, sehingga menjadi sebuah hasil pemikiran yang utuh dan menyeluruh.

Bab *pertama* berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang dan permasalahan, ruang lingkup, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

⁴¹Suhartono W. Pranoto, *Teori & Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 97.

⁴²Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, hlm. 260.

Bab *kedua* adalah Rembang dan Kehidupan Masyarakatnya, dari 1960-an sampai dengan 2014. Bab ini membahas tentang kondisi geografis dan demografis, kondisi sosial-ekonomi, dan kondisi sosial-budaya masyarakat Rembang. Bab ini dibangun sebagai konteks dari pendirian SKKA pada 1970 yang kemudian menjadi SMA Kartini pada 1980.

Bab *ketiga* membahas mengenai SKKA dari 1957-1980. Bab memiliki empat sub-bab. Sub-bab yang pertama membahas mengenai kebijakan pemerintah dan pendirian SKKA, sub-bab kedua, berisi para perintis dan pengembang SKKA Rembang termasuk di dalamnya Soemari H.P. dan Kristina Suka Tiwi, sub-bab ketiga tentang pembentukan kurikulum dan pengembangan sarana dan prasarana, sedangkan sub-bab keempat menjelaskan penurunan animo siswa dan beberapa perubahan penting.

Bab *keempat* pembahasan fokus pada era SMA Kartini dari 1980 sampai dengan 2014. Bab ini terbagi menjadi empat sub-bab, yaitu, pendirian SMA Kartini termasuk para pendirinya, sosok Soenarno sebagai Ketua Yayasan SMA Kartini, para kepala sekolah SMA Kartini sejak 1985 sampai 2014, sampai dengan penurunan animo siswa yang akan dilihat dari faktor penyebab dan strategi bertahan yang dilakukan.

Bab *kelima* adalah simpulan. Bab ini berisi benang merah dari pembahasan-pembahasan sebelumnya. Diharapkan melalui bab ini dapat diperoleh gambaran yang utuh mengenai dinamika perubahan dan perkembangan SKKA menjadi SMA Kartini di Rembang dari 1970 sampai dengan 2014.